

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Guatemala sedang disorot oleh dunia internasional karena tindakan beraninya untuk memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini bertolakbelakang dengan sejarahnya dimana Guatemala pernah mengakui bahwa Palestina adalah suatu negara pada tahun 2013. Guatemala melakukan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara dikarenakan Guatemala yakin pengakuan yang ia lakukan dapat mendorong dalam mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Hal ini dapat dilihat dari kantor presiden Guatemala yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memutuskan untuk mengakui Negara Palestina sebagai negara bebas, berdaulat dan merdeka untuk mendapatkan momentum baru dalam proses perdamaian Israel-Palestina (Liphshiz, 2013).

Guatemala juga pernah menjadi salah satu anggota komite PBB untuk Palestina atau disebut sebagai United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP). Pada tahun 1947, PBB membentuk komite ini atas permintaan Inggris yang menginginkan Palestina menjadi negara. Dengan melalui komite ini, diharapkan untuk dapat menyediakan laporan tentang rekomendasi bagi Palestina untuk dipresentasikan pada sidang umum yang akan diselenggarakan berikutnya (UNSCOP, 1947).

Rekomendasi yang akan diberikan oleh komite ini ialah solusi-solusi yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina yaitu konflik Yahudi dan Arab. Pemilihan anggota komite ini didasari oleh negara-negara yang bisa bersifat netral dalam konflik yang dihadapi Palestina. Guatemala adalah salah satu negara yang dianggap netral dalam kasus ini dan juga sepuluh negara lainnya seperti

Australia, Kanada, Czechoslovakia, India, Iran, Peru, Swedia, Uruguay, Yugoslavia, dan Belanda.

Peran Guatemala di komite khusus Palestina ini diwakili oleh Jorge Garcia Granados. Salah satu usulan Granados ialah setiap negara harus berkontribusi selain lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memberikan pasukan khusus polisi internasional secara proposional sesuai dengan kemampuan pasukan masing-masing negara. Hal ini pasti membutuhkan biaya yang besar sehingga Granados pun mengusulkan untuk biaya dalam mempertahankan kekuatan dari pasukan polisi internasional harus ditanggung oleh lima negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara proporsional terhadap kontribusi tahunan mereka kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1947). Dapat dilihat dari usulan-usulan yang diajukan Granados sebagai wakil dari negara Guatemala adalah bentuk dukungan negara Guatemala untuk menyelesaikan konflik Palestina.

Komite yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina ini menghasilkan dua solusi terbaik. Pertama, dengan membangun dua negara yang merdeka yaitu negara Israel dan Palestina dimana kota Yerusalem menjadi wilayah yang tidak dimiliki oleh kedua negara tersebut melainkan menjadi wilayah internasional. Kedua, mendirikan negara yang federal dimana didalamnya terdapat negara yang mayoritas Yahudi dan negara yang mayoritas Arab. Hasil yang didapat setelah pemilihan berlangsung untuk memilih solusi pertama ataupun kedua ialah mayoritas anggota komite untuk Palestina ini setuju dengan solusi yang pertama.

PBB mengusulkan solusi yang dibentuk oleh komite khusus Palestina ini ke sidang umum PBB. Ada 33 negara yang menyetujui resolusi ini, 13 negara yang menolak resolusi ini, 10 negara abstain, dan 1 negara tidak hadir. Namun dengan adanya resolusi ini tidak membuat konflik Palestina terselesaikan. Hal ini dikarenakan Israel menjadi negara yang terus memperluas wilayahnya. Tidak hanya itu, ternyata resolusi konflik yang diajukan oleh komite khusus

PBB ini secara tidak langsung memaksa Palestina untuk membagikan 55% wilayahnya untuk Yahudi agar mendirikan negara Israel.

Pengakuan Guatemala terhadap Palestina serta keanggotaan komite untuk menyelesaikan konflik Palestina ternyata berbanding terbalik dengan yang dilakukannya pada tanggal 21 Desember 2017 lalu yaitu Guatemala menolak resolusi Majelis Umum dalam konferensi PBB tentang Yerusalem. Setelah menolak resolusi Majelis Umum dalam konferensi PBB, Guatemala juga berencana memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Presiden Guatemala secara mengejutkan mengumumkan rencana pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem di media sosialnya. Pengumuman itu dipublikasikannya sesuai Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengancam hal serupa yang dilakukan oleh Amerika Serikat (Haryono, 2017). Presiden Guatemala melakukan pengumuman tersebut setelah ia berbicara di telepon dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pengumuman yang di umumkan di halaman salah satu media sosial, Facebook oleh Presiden Jimmy Morales sebagai berikut :

”Kami berbicara tentang hubungan baik yang kami miliki seperti negara-negara (lain) sejak Guatemala mendukung pembentukan Negara Israel,” dan “Salah satu isu yang paling relevan adalah mengembalikan Kedutaan Guatemala ke Yerusalem,” (Muhaimin, 2017)

Pernyataan ini dipertegas oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Sandra Jovel dengan mengatakan bahwa Ini adalah keputusan yang telah dibuat dan tidak akan dibatalkan. Pemerintah Guatemala sangat menghormati pandangan dan posisi negara-negara lain dan yakin jika negara-negara lain juga harus menghormati keputusan yang dibuat Guatemala (Finanda, 2017).

Pernyataan yang diumumkan oleh Presiden Guatemala di beranda Facebook pribadinya berubah jadi sebuah kenyataan. Hal ini dapat dilihat ketika Amerika Serikat mengumumkan peresmian perpindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei 2018 lalu, Guatemala pun meresmikan perpindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dua hari setelahnya. Guatemala resmi menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang mendirikan kedutaan besarnya di Yerusalem.

Pada 16 Mei 2018, Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel serta Jimmy Morales sebagai Presiden Guatemala menghadiri upacara peresmian bangunan kedutaan besar yang terletak di Taman Teknologi Malkha di Yerusalem (Yasinta, 2018).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu: **“Apa faktor yang menyebabkan Guatemala memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2017-2018?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui secara teoritis dalam memahami apa yang menjadi faktor negara kecil Guatemala berani memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017-2018.

D. Kerangka Konseptual

Ada satu konsep dan satu teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Guatemala memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2017-2018. Adapun satu konsep dan satu teori tersebut ialah sebagai berikut:

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam memahami kebijakan luar negeri itu sendiri kita harus memisahkan terlebih dahulu kebijakan dan luar negeri. Kebijakan merupakan suatu keputusan atau panduan yang memilih aktor-aktor untuk mencapai suatu tujuan. Luar negeri merupakan semua yang berada di luar suatu negara, area yang dimana negara tersebut tidak memiliki otoritas di atas teritori dan masyarakat. Ketika digabungkan memiliki makna yaitu panduan dalam memilih aktor diluar batas negara untuk mencapai tujuan. Arti kebijakan luar negeri , tujuan, nilai, dan instrumen yang berbeda yang digunakan oleh suatu pemerintah dalam memjalin hubungan antar negara yang lain (Adnan, 2014).

Pengertian kebijakan luar negeri bisa dilihat secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, kebijakan luar negeri dibagi menjadi "sarana pemaksaan" dan "sarana persuasi". Sarana pemaksaan digunakan dalam kebijakan luar negeri suatu negara untuk memaksa negara lain untuk berperilaku sesuai dengan permintaan negara yang menggunakan cara-cara paksaan seperti meninggalkan atau mengubah praktik-praktik tertentu. Sarana persuasi adalah dengan cara seperti diplomasi, biasanya sarana persuasi ini digunakan oleh negara-negara yang tidak mempunyai power yang besar untuk melakukan sarana pemaksaan. Kebijakan luar negeri yang secara tidak langsung ialah berarti refleksi posisi suatu negara di komunitas internasional seperti status international suatu negara, keanggotaan dalam organisasi internasional, serta kredibilitas dan reputasi suatu negara di kawah internasional (Petric, 2013).

Kebijakan luar negeri adalah suatu langkah yang diambil oleh suatu negara yang mana menjadi sebagai respon atau aksi yang dilakukan dalam kawah internasional. Menurut Holsti, kebijakan luar negeri merupakan suatu gagasan yang dibuat untuk memecahkan

suatu masalah maupun mengubah suatu lingkungan (Holsti, 1983). Kebijakan dapat berupa sebuah tindakan yang dimana tindakan suatu negara kepada negara lain dengan tujuan sebagai tanda dalam mendukung ataupun mengubah perilaku negara lain.

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda beda yang didasari oleh tujuan yang berbeda pula. Hal ini dapat dijelaskan oleh Holsti yang membagi tujuan dari kebijakan luar negeri itu menjadi dua yaitu tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka menengah ini bisa berupa bantuan dana, teknologi, industri, maupun militer. Sedangkan tujuan jangka panjang bisa berupa impian maupun rencana yang didalamnya terdapat organisasi politik atau ideologi, dimana ideologi ini menjadi sebuah regulasi yang mengatur kebijakan negara di sistem internasional (Holsti, 1983).

Hal yang mendasar dari terbentuknya kebijakan luar negeri ialah kepentingan nasional suatu negara. Semua yang mencakup kebijakan luar negeri diambil karna adanya suatu tujuan. Reynolds menyatakan bahwa adanya elaborasi tindakan luar negeri suatu negara dengan tujuan, yang dimana tujuan ini sering diabstraksikan sebagai kepentingan nasional (Naaz, 2012; Reynold, 1971). Oleh karenanya, tujuan utama dari suatu kebijakan luar negeri adalah untuk melakukan hubungan internasional yang mana hal ini untuk melindungi kepentingan nasional serta mempromosikan kepentingan nasional itu sendiri demi mendapatkan keuntungan terbaik (Naaz, 2012).

Adanya ancaman dan suatu peluang di kawah internasional juga dapat mempengaruhi pembentukan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Pada dasarnya kebijakan luar negeri adalah hasil dari kepentingan, ancaman, dan peluang negara (Naaz, 2012; Viotti, 2017). Hal ini dipertegas dengan pernyataan Holsti yang menyebutkan bahwa suatu negara tidak akan bisa

menjaga kepentingannya atau melindungi keamanan negaranya dari ancaman-ancaman yang ada hanya dengan cara memobilisasi atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama dengan negara lain yang memiliki masalah yang sama dengannya atau kerjasama dengan negara lain dengan mencapai tujuan masing-masing secara bersama-sama. (Holsti, 1983)

Suatu negara selaku sebuah sistem politik harus dapat menyempurnakan dengan adanya tiga tuntutan utama dari dalam yaitu keamanan dari intervensi luar, kebebasan dan stabilitas didalam sistem itu sendiri, serta kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Tiga tuntutan utama ini disusun menjadi sudut-sudut dalam sebuah segitiga yang mempunyai hubungan timbal balik satu sama lainnya (Muller, 2015; Czempiel, 2001). Adanya hubungan timbal balik satu sama lain dalam tiga tuntutan utama ini menjadi penentu tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Namun adanya tiga tuntutan ini terkadang suatu negara bingung dan mungkin saja ada prioritas yang saling bertentangan satu sama lain. Hal ini yang menyebabkan suatu negara terkadang mustahil dapat memasukan semua tujuannya dalam suatu kebijakan luar negeri (Muller, 2015; Haftendorn, 1989)

Setiap negara pasti memiliki tuntutan atau tujuan tersendiri dan untuk mencapai tuntutan itu, negara membuat suatu kebijakan terhadap negara yang lain. Hal ini juga dilakukan oleh Guatemala, negara kecil yang berada di Amerika Tengah. Guatemala yang merupakan salah satu negara yang kecil dan ini berbadanglingurus dengan *power* yang ia miliki. Dengan *power* yang ia miliki dalam melindungi negaranya, Guatemala bekerjasama dengan negara yang memiliki *power* yang lebih besar dengannya yaitu Amerika Serikat. Guatemala memiliki tuntutan didalam kebijakan luar negerinya berupa keamanan regionalnya. Ini bisa dijelaskan dengan pernyataan Holsti yang mana suatu negara tidak dapat

memobilisasi negaranya sendiri dengan menggunakan kemampuan yang ada di negaranya sehingga perlu adanya bantuan dengan negara lain atau kerjasama dengan negara lain untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, Guatemala berani membuat kebijakan luar negeri berupa pengakuan terhadap Israel yang menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang mana Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pengakuan ini berupa pemindahan kedutaan besar Guatemala dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengakuan ini ditentang oleh beberapa negara di dunia, namun hal itu tidak menghentikan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah Guatemala.

2. Teori Dependensi

Teori dependensi atau teori ketergantungan berakar dari Karl Marx mengenai strukturalisme ekonomi dan hubungan ekonomi antara negara-negara kaya secara ekonomi dan miskin secara ekonomi. Karl Marx berpendapat bahwa sistem dunia dan hubungan internasional didorong dengan adanya kekuatan ekonomi dan eksploitasi. Hal ini digambarkan seperti negara kaya akan mengambil keuntungan dari negara yang miskin dan akan mengontrol mereka melalui ekonomi tersebut. Teori ketergantungan berkembang pada 1950-an dimana Paul Prebisch menemukan fenomena negara-negara industri maju tidak serta merta menyebabkan pertumbuhan di negara-negara miskin dan kegiatan ekonomi di negara-negara kaya sering menyebabkan masalah ekonomi serius di negara-negara miskin. Hal ini bisa terlihat pada karyanya *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problem* yang dikenal sebagai “Manifesto ECLA”. Pada saat itu Prebisch menjadi kepala ECLA. ECLA adalah komisi ekonomi Amerika Latin yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1948 untuk mendorong kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota (Ghosh, 2014).

Prebisch mengkritik skema lama dari pembagian kerja internasional. Dimana pada saat itu negara-negara Amerika Latin diminta untuk memproduksi makanan dan bahan mentah untuk negara pusat industri besar, dan sebagai imbalannya, negara-negara Amerika Latin akan menerima barang-barang industri dari negara pusat industri tersebut. Bagi Prebisch, skema ini merupakan akar dari masalah perkembangan Amerika Latin yang mana terdapat ketergantungan pada ekspor makanan dan bahan mentah tidak terhindarkan yang akan mengakibatkan penurunan perdagangan di Amerika Latin, yang selanjutnya akan mempengaruhi akumulasi modal domestik. Awalnya, Teori Ketergantungan muncul sebagai rasa ketidakpuasan dengan keadaan di negara-negara Amerika Latin. Namun, pada akhirnya, Teori Ketergantungan berubah menjadi kritik terhadap Teori Modernisasi, yang dikembangkan terutama di Amerika Serikat (Hamza, Muharrem, & Bayraktar, 2005).

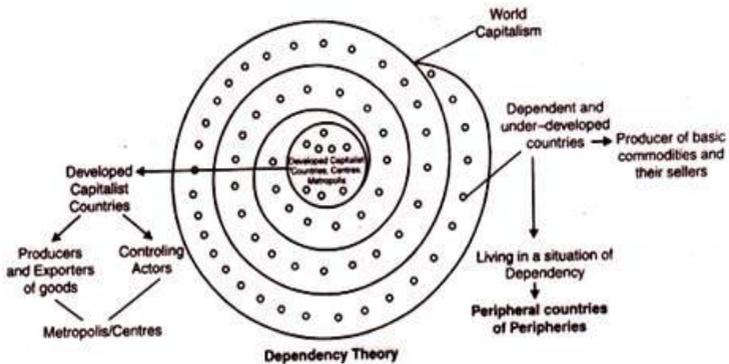
Teori ketergantungan selanjutnya dijelaskan oleh Andre Gunder Frank. Frank menjelaskan sejarah sistem dunia terorganisir saat ini karena adanya kapitalisme secara historis. Jika suatu negara melihat dari sejarah mereka, hubungan negara ini dengan negara lainnya adalah penyebab atau dampak dari sejarah tersebut. Himpunan semua hubungan seperti ini membentuk sistem dunia, dan studi holistik dari sistem ini adalah tempat untuk mempelajari konsekuensinya bagi masing-masing negara yang terlibat. Jika hubungan antara dua negara menghasilkan ketidaksetaraan, untuk memahami negara yang kaya dan negara yang miskin dapat dipahami dengan satu hubungan atau hubungan mereka yang secara bersamaan membawa mereka menjadi negara yang kaya atau negara yang miskin. Hubungan utama antar negara telah menjadi eksploitatif. Nilai pendekatan teori ketergantungan terletak pada pengakuan bahwa pembangunan dan keterbelakangan telah terjadi dalam konteks pertumbuhan kapitalisme sebagai sistem dunia.

Pendekatan ini berguna menganalisis hubungan antara negara dan melihat pembangunan maupun keterbelakangan sebagai konsekuensi yang dapat diamati secara historis. Keterbelakangan sebagai produk dari dominasi satu ekonomi nasional (Friedmann & Wayne, 1977).

Melihat fenomena yang terjadi, Frank mencetuskan model dari teori dependensi ini seperti sistem metropolis dan satelit. Negara-negara kaya sebagai metropolis (pusat) dunia yang membutuhkan negara-negara miskin yang memiliki masalah-masalah sosial sebagai kelompok satelit (pinggiran) dari untuk mempertahankan kekayaan mereka. Hubungan ketergantungan ini antara negara berkembang dan negara maju. Hubungan ketergantungan ini dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif. Dimana negara metropolis memiliki kontrol monopolistik atas hubungan ekonomi dan perdagangan di negara-negara satelit. Dominasi monopolistik dalam suatu pasar merupakan posisi kekuasaan, sehingga adanya negara-negara metropolis berdampak adanya ketidakmampuan negara-negara satelit untuk mengontrol pertumbuhan ekonominya dan terciptalah ketergantungan dalam hubungan tersebut (Deliarnov, 2006).

Teori ketergantungan dijelaskan oleh Frank sebagai “development of underdevelopment”. Hal ini muncul karena pemikir teori ini melihat “ketergantungan” atau “kurang berkembang” sebagai akibat kurangnya pertumbuhan ekonomi mandiri dan berlanjutnya standar kehidupan yang rendah di negara keterbelakang secara ekonomi. Adanya kemerdekaan bagi negara-negara keterbelakangan ini sebenarnya sebagai aspek yang diperlukan dari proses pengembangan kapitalis global secara bersamaan yang menghasilkan perluasan pembagian kerja global dan akumulasi kekayaan bagi negara-negara maju (Blaney, 1996). Frank melihat kemiskinan yang terus-menerus di Dunia Ketiga adalah citra ketergantungan. Menurut Frank, pedagang dan

kekuatan kolonial memaksa negara-negara Dunia Ketiga untuk menjadi pengeksport produk utama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kekuatan dari negara-negara yang maju. Dengan melakukan itu, para pedagang dan kekuatan kolonial ini memasukkan elit Dunia Ketiga sebagai sistem eksploitasi mereka. Para elit didalam sistem ini sebagai perantara antara pembeli pedagang yang kaya dan produsen yang miskin. Frank menyebut bentuk ketergantungan ini ialah *lumpenbourgeoisie* dan *lumpendevelopment*. Elit *lumpenbourgeoisie* sebagai agen utama dari hubungan ketergantungan (Preston, 2005). Teori ketergantungan yang dijelaskan oleh Frank bisa dilihat dari gambar berikut,



(Sumber: www.yourarticlelibrary.com, 2017)

Gambar 1.1 Teori Ketergantungan menurut Andre Gunder Frank

Ketergantungan dapat didefinisikan sebagai penjelasan tentang perkembangan ekonomi dalam hal pengaruh eksternal (politik, ekonomi, dan budaya) pada kebijakan pembangunan nasional. Theotonio Dos Santos menekankan dimensi historis dari hubungan ketergantungan dalam definisinya yaitu,

“Ketergantungan adalah ... suatu kondisi historis yang membentuk struktur tertentu dari ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga itu menguntungkan beberapa negara dengan merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan pengembangan bawahan ekonomi ... situasi di mana ekonomi kelompok negara tertentu dikondisikan oleh pembangunan dan perluasan ekonomi lain, yang menjadi sasaran ekonomi mereka sendiri (Uwazie & dkk, 2015; Dos Santos, 1971)”.

Teori ketergantungan dikembangkan lagi oleh Wallerstein dimana ia membuat konsep sistem dunia modern (Modern World System) yang membagi negara menjadi tiga bagian. Pertama, negara Centre (pusat) sebagai negara yang maju dan memiliki kapital yang besar. Kedua, negara Semi-Peryphery (semi-pinggiran) sebagai negara yang lebih banyak memainkan peran perantara dalam perdagangan. Ketiga, negara Peryphery (pinggiran) sebagai negara yang miskin dan sumber dari eksploitasi (Winarno, 2009).

Ada tiga definisi umum yang dimiliki oleh sebagian besar ahli teori ketergantungan. Pertama, Ketergantungan mencirikan sistem internasional yang terdiri dari dua set negara, dengan berbagai cara dominan dan tergantung, pusat dan pinggiran atau metropolitan dan satelit. Kedua, kekuatan eksternal sangat penting untuk kegiatan ekonomi dalam negara-negara tergantung. Kekuatan eksternal ini termasuk perusahaan multinasional, pasar komoditas internasional, bantuan asing, komunikasi, dan cara-cara lain untuk negara-negara industri maju dapat mewakili kepentingan ekonomi mereka di luar negeri. Ketiga, definisi ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antara negara dominan dan tergantung bersifat dinamis karena interaksi antara dua negara cenderung tidak hanya memperkuat tetapi juga mengintensifkan pola yang tidak sama. Selain itu, ketergantungan adalah proses

sejarah yang sangat mendalam, berakar pada internasionalisasi kapitalisme (Uwazie & dkk, 2015).

Teori ketergantungan ini berkaitan erat dengan kasus Guatemala memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2017-2018. Guatemala memindahkan kedutaan besarnya karena mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dapat dilihat ketika Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap Israel, dua hari setelahnya Guatemala pun melakukan hal yang sama. Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena adanya ketergantungan Guatemala dengan Amerika Serikat. Ketergantungan Guatemala ini ialah bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dan tidak hanya itu, Amerika Serikat merupakan mitra strategis Guatemala dalam bidang ekspor dan impor. Dalam teori ketergantungan ini, Amerika Serikat tergolong kepada negara *Centre*/Pusat/Metropolis dan Guatemala adalah negara *Periphery*/Pinggiran/Satelit. Guatemala sangat tergantung dengan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat sehingga Guatemala tidak dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri, sehingga Amerika Serikat memiliki kontrol dalam hubungannya dengan Guatemala.

Guatemala digolongkan sebagai negara *Periphery* karena Guatemala masih memiliki masalah-masalah sosial yang tidak dapat dimobilisasi dengan sendiri. Masalah-masalah sosial ini berupa kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, Guatemala menjadi jembatan obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat dan tidak hanya itu, Guatemala juga menjadi negara penyumbang imigran terbesar di Amerika Serikat, dimana imigran ini banyak yang ilegal. Hal ini akan mengganggu hubungan Guatemala dengan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat,

Guatemala membutuhkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pernah menyampaikan akan memberhentikan bantuan ekonomi bagi negara-negara yang tidak mengikuti keputusannya untuk menolak resolusi PBB tentang Yerusalem. Melihat hal itu, Guatemala “takut” untuk kehilangan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Sehingga Guatemala dengan berani mengikuti keputusan Amerika Serikat untuk menolak resolusi PBB. Setelah adanya penolakan itu, Amerika Serikat pun memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Guatemala juga mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan berani. Guatemala memanfaatkan pemindahan kedutaan besar ini untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Guatemala adalah negara yang “tunduk” kepada Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat akan terus memberikan bantuan ekonomi kepada Guatemala. Guatemala menjadikan Israel sebagai variabel untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat.

E. Hipotesis

Faktor yang menyebabkan Guatemala memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2017-2018 adalah Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

F. Batasan Penelitian

Mengingat penelitian mengenai faktor yang menyebabkan Guatemala memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem memiliki cakupan yang luas, maka pada penelitian ini akan dibatasi pada tahun 2017-2018.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang diambil dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dimana data dianalisa dengan deskriptif. Metode ini mengumpulkan data dengan menggunakan unit analisa negara.

Metode deskriptif ini memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap suatu peristiwa yang dalam hal ini tindakan Guatemala yang memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menjelaskan faktor yang menyebabkan Guatemala melakukan itu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dimana memperoleh data-data dari menelaah pustaka yang berasal dari buku, surat kabar, maupun internet. Data sekunder ini juga menggunakan *official statements* yang terdapat dari pernyataan Presiden serta Menteri Luar Negeri Guatemala sebagai perwakilan dari negara Guatemala itu sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Kerangka Konseptual, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan tentang sejarah, budaya, sistem pemerintahan, ekonomi, serta politik Guatemala

Bab III menjelaskan hubungan kerjasama Guatemala dengan Israel dalam bidang politik, ekonomi, dan militer

Bab IV menjelaskan pemindahan kedutaan besar Guatemala ke Yerusalem sebagai alat memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat

Bab V kesimpulan